

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV. Darus Sunah, 2015.

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

Agus Triyatna dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*.

Dinda Anna Zatika, Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyokotabaru Antara PT. Hutama Karya (Persero) Dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, ed.1. cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2017).

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).

Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006).

Hansen Seng, Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi, Cetakan 3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017).

Muhammad Abdul Wahab, Lc. Teori Akad dalam Fikih Muamalah, Cetakan Pertama, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, 2012.

Salim dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutera Bandung, 2008.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi Pemerintahan.*

_____, *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 322 K/Pdt/2017.

D. Jurnal dan Internet

Ahadi, Pekerjaan tambah atau kurang Proyek bangunan

<http://www.ilmusipil.com/pekerjaan-tambah-atau-kurang-proyek-bangunan>. diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

- Asma Nabila, “Konsep Harga dalam Islam”, <https://www.kompasiana.com/asmanabila/5850fea986afbdb31c5d3fdf/konsep-harga-dalam-islam?page=all#sectionall>. diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Fatoni, Alif, Et.al. “Analisa Eskalasi Biaya Pada Proyek Infrastruktur Tahun Jamak (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang)”. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4082/3974>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
- Herman Brahmana, “*eskalasi dan force majeure dalam perundang-undangan jasa konstruksi*” USU Law Journal, Vol.3. No.2,
- H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauiddin Makassar dan IAIN Watampone, 2018),
- Marwan Lubis, S.Ag., M.H., “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn dan Hukum*, vol. 14 No. 1 April 2019
- Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad”, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/1836/2502/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- Tjik Mail, “Kontrak tahun Jamak (*Multi Years Contract*)”, <https://id..scribd.com/doc/263219290/Kontrak-tahun-Jamak-Multi-Years-Contract>. diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
- Riadi, Muchlisin, “Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi”, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>, Kamis, 31 Januari 2019. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
- “pekerjaan tambah/kurang dalam kontrak pekerjaan konstruksi”, https://www.academia.edu/6673565/Type_teks_PEKERJAAN_TAMBAH_KURANG_DALAM_KONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI_PEKERJAAN_TAMBAH_KURANG_DALAM_K

ONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

Pengertian barang dan jasa, ciri, macam dan definisi menurut para ahli”,
<https://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html>. diakses pada tanggal 29 November 2019.

Anggaran.depkeu.go.id/.<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/Paparan%20Sosialisasi%20Penggangan%202016/3%20Pengajuan%20persetujuan%20kontrak%20tahun%20jamak.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pembangunan>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/masjid>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Metode Perhitungan Harga Satuan, <http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Fenomena Islamic Centre, <https://thaybah.id/2011/02/fenomena-islamic-centre/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Ahadi, <http://www.ilmusipil.com/pekerjaan-tambah-atau-kurang-proyek-bangunan>. diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, ed.1. cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 62.

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 12.

¹ Tjik Mail, “Kontrak tahun Jamak (*Multi Years Contract*)”, <https://id.scribd.com/doc/263219290/Kontrak-tahun-Jamak-Multi-Years-Contract>. diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

¹ “Pengertian barang dan jasa, ciri, macam dan definisi menurut para ahli”, <https://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html>. diakses pada tanggal 29 November 2019.

¹ Dinda Anna Zatika, Skripsi TinjauanYuridis Terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbangi Besar Paket 2 Sidomulyokotabaru Antara PT. Utama Karya

(Persero) Dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hal.23

¹ Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

¹ Kontrak standar dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Standaard Voorwaarden*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *Allgemeine Geschäft Bedingun*, dan dalam bahasa Inggris disebut *Standard Contract*. Menurut Sukarmi, di luar negeri belum terdapat keseragaman dalam menggunakan kontrak baku. Di Jerman terdapat beberapa istilah yang berbeda dengan kontrak standar, seperti *Allgemeine beschaft badigun* atau *standaardvertrag* atau *standaarkonditingen*. Hukum Inggris menyebutnya dengan *standart contract*, yang oleh Mariam Badruzzaman diartikan dengan perjanjian baku. Lihat: Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayanng-bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutera Bandung, 2008, Hlm. 45.

¹ “*Standaardvoorwaarden zijn schriftlijke concept bedigen welke zijn opgesteld om zonder onderdandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van befaal aard*”. Lihat: Hondius, *Standaardvoorwaarden*, Disertasi, Leiden, 1978, Hlm. 243.

¹ *Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast semenstel van contracts bedigen*. Baca: *Drooglever Fertuijn, De Overheid en de standaadconctacten*, WPNR 5607, 1970.

¹ Pasal 1 ayat (22) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

¹ Mariam Darus Badruzzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan, Alumni*, Bandung, 1981

¹ Abu Sopian Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang, “pentingnya memahami jenis kontrak pengadaan barang/jasa”, <http://www.hukumkontrak.com/2017/04/pentingnya-memahami-jenis-kontrak.html>. diakses 25 November 2019

¹ Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

¹ Keterkaitan UU nomor 9 Tahun 1995 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah karena Undang-undang dimaksud dijadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah dalam rangka pendayagunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil, atau koperasi setempat dalam proses pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah.

¹ Keterkaitan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah dalam pasal 22,23,24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹ Keterkaitan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 merupakan konsiderans dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Tahun 2012 sehingga banyak keterkaitan ketentuan antara keduanya.

¹ Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Instansi Pemerintah, mengatur bahwa penyedia barang atau jasa instansi pemerintah salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi Swasta, dan kebanyakan bentuk badan hukumnya adalah Yayasan.

¹ Ahadi, “pekerjaan tambah atau kurang proyek bangunan”, <http://www.ilmusipil.com/pekerjaan-tambah-atau-kurang-proyek-bangunan>. diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

¹ “pekerjaan tambah/kurang dalam kontrak pekerjaan konstruksi”, https://www.academia.edu/6673565/Type_teks_PEKERJAAN_TAMBAH_KURANG_DALAM_KONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI_PEKERJAAN_TAMBAH_KURANG_DALAM_KONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

¹ Seng Hansen. *Op.cit.*, hal 188.

¹ *Ibid.*, hal.189.

¹ Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi, Cetakan 3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017

¹ Herman Brahmana, “*eskalasi dan force majeure dalam perundang-undangan jasa konstruksi*” USU Law Journal, Vol.3. No.2, hal. 80-82.

¹ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 42

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹ Salim dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 7.

¹ Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad”, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/1836/2502/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 46.

¹ Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 150.

¹ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 174.

- ¹ Hasanudin, *op.cit.*
- ¹ Muhammad Abdul Wahab, Lc. Teori Akad dalam Fiqih Muamalah, Cetakan Pertama, (Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019), hal.15.
- ¹ *Ibid.*,
- ¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 46
- ¹ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 15.
- ¹ Agus Triyatna dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, hal.72.
- ¹ Abdul, *op.cit.*, hal. 37.
- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fiqih Mua malat* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 143
- ¹ Marwan Lubis, S.Ag., M.H., “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn dan Hukum*, vol. 14 No. 1 April 2019, hal. 130-131.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauiddin Makassar dan IAIN Watampone, 2018), hal.110.
- ¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 87.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauiddin Makassar dan IAIN Watampone, 2018), hal.110.
- ¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 87.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ Syafei, *op.cit.*, hal. 8.
- ¹ Idris, *op.cit.*, hal. 114.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- ¹ Asma Nabila, “Konsep Harga dalam Islam”, <https://www.kompasiana.com/asmanabila/5850fea986afb31c5d3fdf/konsep-harga-dalam-islam?page=all#sectionall>. diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- ¹ Agama, *op.cit.*,
- ¹ *Ibid.*
- ¹ *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan Tjitrosudibio. cet 41, (PT Balai Pustaka, 2016), hal. 323.
- ¹ *Ibid.*, hal. 324.